



SKS SMP NEGERI UNGGULAN BIKIN KHAWATIR

Orangtua Siswa Baru

Ketar-ketir

UMBULHARJO (MERAPI) - Sebagian orangtua siswa baru di SMP Negeri 5 Yogya *ketar-ketir* atau resah dan khawatir dengan penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diterapkan di sekolah unggulan itu. Dikhawatirkan siswa tidak mampu mengikuti pembelajaran jika masuk kelompok SKS hingga 4 sampai 5 tahun.

Salah satu orangtua siswa baru SMP Negeri 5 Yogya, Siti Sutarni khawatir dengan pembelajaran SKS yang diberlakukan membuat anaknya tidak bisa mengikuti pola pembelajaran itu. Apalagi dalam penentuan pengelompokan SKS di antaranya melihat dari tes potensi akademik dan tes psikologi.

"Nilai anak saya 23 masuk SMPN 5 Yogya melalui jalur zonasi. Bisa saja saat tes lagi hasil nilainya rendah. Takutnya kalau harus dengan SKS empat sampai lima tahun dampaknya ke anak," kata Siti warga Klitren Gondokusuman, di sela pertemuan dengan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (10/7).

Menurutnya jika anak tidak mampu dari hasil pembelajaran dengan model tinggal kelas tidak masalah karena anak sudah mencoba pembelajaran satu tahun dulu. Namun dengan sistem SKS yang langsung dikelompokkan misal mengikuti pembelajaran sistem 4 sampai 5 tahun sejak masuk pertama, ia khawatir akan mengganggu psikologi anak.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta

Antonius Fokki Ardianto menyatakan dari pengakuan beberapa orangtua siswa baru mendapat tekanan dari papan pengumuman terkait SKS yang diterapkan di SMP Negeri 5 Yogya saat Penerimaan Peserta Didik Baru. Pemasangan itu dituding bisa menakut-nakuti para calon siswa yang memiliki nilai rendah mendaftar di sekolah itu.

Dia menilai pelaksanaan tes akademik untuk mengelompokkan siswa tidak sesuai dengan semangat zonasi untuk pemerataan pendidikan. Dia menyebut sesuai Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB maupun Permendikbud tentang SKS tidak ada kewajiban melakukan tes potensi akademik lagi.

"Yang menentukan SKS mengacu pada beban pembelajaran di dasar, nilai sekolah dan nilai IPK. Tidak ada tes potensi akademik," tambah Fokki seraya mengatakan pertemuan itu untuk klarifikasi dari dinas terkait agar orangtua siswa tidak resah.

Menanggapi hal itu Kepala SMP Negeri 5 Yogya, Suharno menyampaikan SMP Negeri 5



MERAPI-TRI DARMIYATI

Sejumlah orangtua siswa baru SMPN 5 Yogya saat melakukan pertemuan dengan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta.

Yogya sebagai sekolah rujukan pelaksanaan SKS harus menjalankan sistem SKS. Sebelum PPDB zonasi SMP N 5 Yogya sudah menerapkan SKS itu. Diakukannya ada rencana paket SKS yang akan diterapkan tahun ini disusun sampai 10 semester atau 5 tahun. Penerapan itu tidak melanggar Permendikbud tentang SKS. Saat dibuat hingga 10 semester (5 tahun) anak lulus umur 17 tahun dan batas masuk SMA umur 18 tahun.

"Tahun lalu dibuat sama 4 semester (2 tahun) semua kelas unggulan. Tahun ini dengan nilai yang masuk ada perbedaan jauh karena sistem zonasi, maka pola pembelajarannya diubah dengan rentang lebih panjang. Anak yang pembelajarannya lambat bisa mengambil SKS sedikit sesuai kemampuan. Yang pembelajaran cepat bisa mengambil lebih banyak SKS," terang Suharno.

Sementara itu Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota

Yogyakarta Hasyim menjelaskan, penerapan SKS diterapkan di 7 SMP sejak tahun lalu yakni di SMPN 1 Yogya, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 16 dan SMP Muhammadiyah 3 Yogya. Dalam SKS proses pendidikan menjadi 4, 5, 7, 8 semester. Tahun lalu ada 3 SMPN yang menerapkan pola 4 semester yaitu SMPN 1, 5 dan 8. "SKS melayani kebutuhan peserta didik sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki siswa," imbuh Hasyim. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005